

**DETERMINAN PENGALOKASIAN BELANJA MODAL DENGAN
PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA
PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA**

**Verawaty
Citra Indah Merina
Mela Sari
Universitas Bina Darma**

Abstract:

This study is aimed to examine the determinants of the allocation of capital expenditure with economic growth as moderating variable in the budgets of provincial governments. The population in this study is all provincial governments of Indonesia consists of 33 provinces in 2012. Based on the results of hypothesis testing, the local financial independence ratio has significant negative effect on the allocation of capital expenditures, but the local financial effectiveness ratio, the regional financial efficiency ratio, General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), and economic growth do not show significant positive effects on the allocation of capital expenditures. However, the results of hypothesis testing local revenue (PAD) and Revenue Sharing Fund (DBH) have significant positive correlations to the allocation of capital expenditures. The results of hypothesis testing with economic growth as the moderating variable to PAD and DAU show that both do not have positive significant effects on the allocation of capital expenditures.

Keywords: *local financial independence ratio, local financial effectiveness ratio, regional financial efficiency ratio, PAD, DBH, DAU, DAK, economic growth*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menguji determinan atau faktor penentu pengalokasian belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderating dalam APBD pemerintah provinsi di Indonesia. Populasi penelitian adalah seluruh pemerintah provinsi pada tahun 2012. Berdasarkan hasil uji hipotesis, rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap pengalokasian belanja modal. Hasil uji hipotesis rasio efektivitas keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, DAU, DAK, dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pengalokasian belanja modal. Namun, hasil uji hipotesis PAD dan DBH memiliki hubungan signifikan positif terhadap pengalokasian belanja modal. Adapun hasil uji hipotesis dengan variabel moderating pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa PAD dan DAU tidak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pengalokasian belanja modal.

Kata Kunci: rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi keuangan daerah, PAD, DBH, DAU, DAK, pertumbuhan ekonomi

1. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan disektor publik sehingga mampu menarik investor untuk melakukan investasi di daerah sehingga pelaksanaan otonomi daerah diharapkan mampu membangun daerah secara optimal dan memacu pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan pelayanan disektor publik yang baik maka pemerintah daerah perlu meningkatkan alokasi belanja pada fasilitas, sarana dan insfratruktur.

Tujuan pengalokasian tersebut bertujuan untuk menyediakan pelayanan publik yang memadai sehingga dapat meningkatkan produktivitas perekonomian. Apabila sarana prasarana suatu daerah memadai maka dapat meningkatkan investasi dan masyarakat dapat melaksanakan aktivitasnya dengan nyaman sehingga produktivitas dapat meningkat.

Pembangunan sarana prasarana dan insfratruktur yang digunakan untuk kepentingan pelayanan publik didanai dari alokasi belanja modal. Jika pertumbuhan ekonomi suatu daerah meningkat maka pemerintah daerah akan meningkatkan belanja modal untuk memperbaiki dan melengkapi infrastruktur dan sarana prasarana dengan tujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran dalam pencapaian aset tetap serta aset lainnya yang dapat memberikan dampak positif lebih dari satu periode akuntansi.

Sumber dana pengalokasian belanja modal berasal dari PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Selain itu Dana Perimbangan Daerah yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) juga merupakan sumber dana serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kinerja keuangan daerah dapat diukur menggunakan rasio keuangan daerah yuang berguna untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efisiensi dan efektifitas dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktifitas Pemerintah Daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu (Halim, 2008). Selain itu menurut Halim (2008), analisis rasio keuangan daerah terhadap APBD perlu dilaksanakan. Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang akan dibahas yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi

keuangan daerah, PAD, DBH, DAU, dan DAK, serta pertumbuhan ekonomi dan menggunakan variabel moderating yang bertujuan untuk memperkuat determinan yaitu pertumbuhan ekonomi.

Pada penelitian ini peneliti mengacu pada Sugiardi dan Supadmi (2014), peneliti menggunakan lima variabel independen tambahan, yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi, rasio efektivitas keuangan daerah, DBH, dan DAK serta dua variabel lainnya yaitu PAD dan DAU, sehingga total variabel yang digunakan sebanyak tujuh variabel. Peneliti juga ingin menguji variabel-variabel tersebut karena hasil penelitian tentang alokasi belanja modal masih menghasilkan temuan jika diterapkan pada kondisi lingkungan yang berbeda. Pemilihan objek penelitian yaitu seluruh provinsi di Indonesia. Sejauh ini penelitian banyak dilakukan pada satu provinsi saja, belum ada penelitian mengenai alokasi belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderating yang menjadikan seluruh provinsi sebagai objek penelitian.

Motivasi yang melandasi penelitian ini yaitu permasalahan tentang sejauh mana besarnya rasio-rasio dan variabel APBD mempengaruhi pola belanja modal khususnya belanja modal untuk melayani publik. Selain itu, pemerintah daerah kurang mengupayakan peningkatan pelayanan publik melainkan lebih mengupayakan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan mengenai determinan atau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengalokasian belanja modal dan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengalokasian belanja modal serta pengaruh pertumbuhan ekonomi dalam hubungan antara determinan dengan alokasi belanja modal.

Bila dikaitkan dengan AEC (*ASEAN Economic Community*), tantangan sebenarnya sebelum mengarah kepada kesiapan pelaku ekonomi pasar bebas adalah kesiapan pemerintah daerah untuk menunjukkan kinerjanya sebagai badan publik untuk bisa mengedepankan ketepatan sasaran mempengaruhi pengalokasian belanja modal. Tentunya maksimalitas upaya pemerintah daerah untuk memberikan semua peluang atas dampak AEC akan lebih baik jika kinerja pemerintah secara internal juga telah baik.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori-teori yang digunakan

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Zimmerman (1977), *agency problem* juga ada dalam konteks organisasi pemerintahan. Rakyat sebagai prinsipal memberikan mandat kepada pemerintah sebagai agen, untuk menjalankan tugas pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks lain, politisi dapat juga disebut prinsipal karena menggantikan peran rakyat. Namun dapat juga dipandang sebagai agen karena menjalankan tugas pengawasan yang diberikan oleh rakyat. Implikasi dari teori ini, prinsipal, yaitu rakyat secara langsung perlu melakukan pengawasan kepada agen, baik pemerintah maupun para politisi. Politisi sebagai prinsipal juga memerlukan informasi untuk mengevaluasi jalannya pemerintah.

Hubungan prinsipal dan agen dapat dilihat dalam politik demokrasi (Moe, 1984). Masyarakat adalah prinsipal, politisi (legislatif) adalah agen mereka. Politisi (legislatif) adalah prinsipal, birokrat/pemerintah adalah agen mereka. Pejabat pemerintahan adalah prinsipal, pegawai pemerintahan adalah agen mereka. Keseluruhan politik tersusun dari alur hubungan prinsipal-agen, dari masyarakat hingga level terendah pemerintahan. Fadzil dan Nyoto (2011) juga menyatakan bahwa terdapat hubungan prinsipal-agen antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat adalah prinsipal dan pemerintah daerah bertindak sebagai agen. Hal ini dikarenakan, Indonesia sebagai negara kesatuan, pemerintah daerah bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai pemilih dan juga kepada pemerintah pusat.

Jika dikaitkan dengan pengalokasian belanja modal maka pemerintah daerah atau eksekutif mengalokasikan belanja modal sesuai dengan kepentingan pelayanan publik. Eksekutif akan memiliki kecenderungan mengusulkan anggaran belanja yang lebih besar dari yang aktual terjadi saat ini (asas maksimal). Sebaliknya untuk anggaran pendapatan, eksekutif cenderung mengusulkan target yang lebih rendah (asas minimal) agar ketika realisasi dilaksanakan, target tersebut lebih mudah dicapai. Usulan anggaran yang mengandung *slack* seperti ini merupakan gambaran adanya asimetri informasi antara eksekutif dan legislatif.

2. Teori Pilihan Rasional

Menurut Sugiardi dan Supadmi (2014), teori pilihan rasional adalah sebuah konsep yang menjelaskan bagaimana memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan atau yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka atau dengan kata lain

memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir biaya. Meskipun teori ini berakar pada ilmu ekonomi, tetapi dalam perkembangannya teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi pada berbagai macam disiplin ilmu termasuk di dalamnya bagaimana menjelaskan sebuah pilihan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan publik.

Jika dikaitkan dengan pengalokasian belanja modal maka pemerintah daerah memiliki pilihan tindakan yang harus dilakukan dalam mengalokasikan belanja modal. Pemerintah memiliki pilihan apakah dengan memberikan pelayanan publik yang baik maka pemerintah perlu memperbesar jumlah anggaran belanja modal yang dibelanjakan. Namun apabila pemerintah daerah mengutamakan pembelanjaan anggaran untuk sektor lain pemerintah mempunyai hak untuk memilih pilihan tersebut.

2.2 Penelitian-Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan daerah terhadap pengalokasian Belanja modal.

Menurut Fitri (2013), Rasio Kemandirian keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh daerah yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan pemberian otonomi daerah yang lebih besar kepada daerah. PAD selalu dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Realitas hubungan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap pembangunan daerah. Hal ini terlihat jelas dari rendahnya PAD terhadap total pendapatan daerah dibandingkan dengan total subsidi yang didrop dari pusat.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Ardhini (2011) dan Fitri (2011), menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap pengalokasian belanja modal. Hal ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Hidayat (2013), Sularso dan Restianto (2011) serta Kusumawati (2011), bahwa rasio kemandirian keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap pengalokasian belanja modal. Dari beberapa penelitian terdahulu, masih adanya temuan hasil penelitian yang tidak konsisten. Dengan demikian peneliti perlu melakukan pengujian kembali untuk mengetahui konsistensi temuan penelitian pengalokasian belanja modal ke dalam hipotesis sebagai berikut:

H₁: Rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal.

2. Pengaruh Rasio Efektivitas Keuangan daerah terhadap pengalokasian Belanja modal.

Menurut Fitri (2013), rasio efektivitas bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan. Semakin tinggi rasio efektivitas ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD (Dwirandra, 2006). Rasio efektivitas pendapatan dihitung dengan cara membandingkan realisasi pendapatan dengan target penerimaan pendapatan yang dianggarkan (Halim, 2012).

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin besar realisasi penerimaan PAD dibanding target penerimaan PAD, maka dapat dikatakan semakin efektif, begitu pula sebaliknya (Ardhini, 2011). Kemampuan keuangan daerah dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri (2014), Hidayat (2013), Sularso dan Restianto (2011), serta Ardhini (2011) menunjukkan hasil bahwa tingkat efektivitas berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Dari beberapa penelitian terdahulu, masih adanya temuan hasil penelitian yang tidak konsisten sehingga peneliti perlu melakukan pengujian kembali untuk mengetahui konsistensi temuan penelitian pengalokasian belanja modal ke dalam hipotesis sebagai berikut:

H₂: Rasio efektivitas keuangan daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal.

3. Pengaruh Rasio Efisiensi Keuangan daerah terhadap pengalokasian Belanja modal.

Menurut Fitri (2013), Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Efisiensi yang rendah menyebabkan banyaknya layanan publik dijalankan apa adanya secara tidak efisien dan kurang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan publik, sementara dana pada anggaran daerah yang pada dasarnya merupakan dana publik sebagian dibelanjakan untuk belanja pegawai. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini dengan mengasumsikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi dari apa yang direncanakan (Ardhini, 2011).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Ardhini (2011) dan Fitri (2013), menunjukkan hasil bahwa efisiensi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Berbeda dengan Sularso dan Restianto (2011) Hidayat (2013), dan Kusumawati (2011), efisiensi keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Dari beberapa penelitian terdahulu, masih adanya temuan hasil penelitian yang tidak konsisten sehingga peneliti perlu melakukan pengujian kembali untuk mengetahui konsistensi temuan penelitian pengalokasian belanja modal ke dalam hipotesis sebagai berikut:

H₃: Rasio efesiensi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal.

4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap pengalokasian Belanja modal.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal yang signifikan hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah tersebut banyak tersedot untuk membiayai belanja lainnya (Pradita, 2013).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Sugiardi dan Supadmi (2014) dan Ardhini (2011), Sulistyowati (2011) dan Fitri (2013), menunjukkan hasil variabel PAD yang berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan menurut Yovita (2011) PAD tidak memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal. Selain itu, Ogujiuba dan Abraham (2012) yang melakukan penelitian di Nigeria juga memperoleh hasil bahwa pendapatan dan pengeluaran sangat berkorelasi. Dari beberapa penelitian terdahulu, masih adanya temuan hasil penelitian yang tidak konsisten sehingga peneliti perlu melakukan pengujian kembali untuk mengetahui konsistensi temuan penelitian pengalokasian belanja modal ke dalam hipotesis sebagai berikut:

H₄: Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal.

5. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap pengalokasian Belanja modal.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu DBH

pajak dan DBH bukan pajak (Sumber Daya Alam). DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK.

Secara teoritis Pemerintah daerah akan mampu menetapkan belanja modal yang semakin besar jika anggaran DBH semakin besar pula, begitupun Sebaliknya semakin kecil belanja modal yang akan ditetapkan jika anggaran DBH semakin kecil. DBH berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (Wandira, 2013). Hal ini didukung oleh Romario (2012) di Aceh, Wandira (2013) seluruh Provinsi di Indonesia dan Siregar (2013), terdapat hubungan yang signifikan antara DBH terhadap belanja modal. Berbeda dengan Jiwatami (2013) menemukan bukti empiris bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal. Dari beberapa penelitian terdahulu, masih adanya temuan hasil penelitian yang tidak konsisten sehingga peneliti perlu melakukan pengujian kembali untuk mengetahui konsistensi temuan penelitian pengalokasian belanja modal ke dalam hipotesis sebagai berikut:

H₅: Dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal.

6. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap pengalokasian Belanja modal.

Menurut Solikin (2010), Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan keuangan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAU) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Pradita (2012) di Provinsi Jawa Timur variabel DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal hal ini disebabkan karena dengan adanya transfer DAU dari pemerintah pusat maka pemerintah daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai Belanja Modal. Hal ini didukung oleh Sugiardi dan Supadmi (2014) di Bali, Ardhani (2011) di Jawa Tengah dan Solikin (2009) di Jawa Barat variabel DAU berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal. Namun hal ini berbeda dengan Fitri (2012) di Riau dan Kusnandar dan Siswantoro (2012) variabel DAU tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Dari beberapa penelitian terdahulu,

masih adanya temuan hasil penelitian yang tidak konsisten sehingga peneliti perlu melakukan pengujian kembali untuk mengetahui konsistensi temuan penelitian pengalokasian belanja modal ke dalam hipotesis sebagai berikut:

H₆: Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal

7. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap pengalokasian Belanja modal.

Menurut Ardhani (2011), Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Darmayasa dan Suandi (2014), DAK memiliki hubungan yang positif namun tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah provinsi. DAK bersifat *special grant*, dimana peruntukannya untuk pembangunan yang sudah ditentukan dari pusat, yang lebih diprioritaskan untuk belanja modal. Hal ini berbeda dengan Situngkir (2009), Ardhani (2011) dan Wandira (2012), DAK memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sulistyowati (2012) yang melakukan penelitian di Jawa dan Bali berbeda dari penelitian sebelumnya, menghasilkan bahwa DAK berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Dari beberapa penelitian terdahulu, masih adanya temuan hasil penelitian yang tidak konsisten sehingga peneliti perlu melakukan pengujian kembali untuk mengetahui konsistensi temuan penelitian pengalokasian belanja modal ke dalam hipotesis sebagai berikut:

H₇: Dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal

8. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap pengalokasian Belanja modal.

Menurut Hasan (2012), Pertumbuhan ekonomi merupakan parameter dari suatu kegiatan pembangunan, hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi dapat mengukur tingkat perkembangan aktivitas pada sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Putro (2010) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan dari kegiatan perekonomian dimana hal tersebut berdampak pada jumlah produksi barang dan jasa yang semakin bertambah sehingga kemakmuran masyarakat meningkat.

Penelitian yang dilakukan Sularno (2013), Taiwo dan Abayomi (2011) menunjukkan bahwa adanya hubungan yang positif antara PDB dan belanja modal. Namun berbeda dengan Ardhani (2011), Maharani (2010) dan Putro (2010) tidak terdapat pengaruh antara pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal. Dari beberapa penelitian terdahulu, masih adanya temuan hasil penelitian yang tidak konsisten sehingga peneliti perlu melakukan pengujian kembali untuk mengetahui konsistensi temuan penelitian pengalokasian belanja modal ke dalam hipotesis sebagai berikut:

H₈: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal

9. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pada Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah Dengan Pengalokasian Belanja Modal.

Besarnya pertumbuhan ekonomi yang terdapat pada masing-masing daerah dapat memperkuat maupun memperlemah hubungan antara PAD terhadap belanja modal. Hal ini dikarenakan untuk memenuhi belanja pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik diperlukan dana untuk membiayai belanja tersebut dalam hal ini pendapatan daerah. PAD merupakan salah satu komponen pendapatan daerah maka pada penelitian ini ditambahkan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderating yang dapat mempengaruhi hubungan PAD terhadap belanja modal. Berdasarkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sugiardi dan Supadmi (2014) pertumbuhan ekonomi berhasil memoderasi hubungan antara PAD terhadap belanja modal. Selain itu Jaya dan Dwirandra (2014) mendapatkan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah pada belanja modal tetapi dengan intensitas dan arah yang berlawanan.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis ingin menguji pertumbuhan ekonomi dalam mempengaruhi hubungan antara PAD dan belanja modal daerah dengan hipotesis sebagai berikut:

H₉: Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pengaruh positif PAD terhadap pengalokasian belanja modal.

10. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pada Hubungan Antara Dana Alokasi Umum (DAU) Dengan Pengalokasian Belanja Modal.

Besarnya pertumbuhan ekonomi yang terdapat pada masing-masing daerah dapat memperkuat maupun memperlemah hubungan antara Sumber dana yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi

Khusus (DAK) terhadap belanja modal. Tingkat pertumbuhan ekonomi diduga dapat memperkuat pengaruh DAU pada belanja modal.

Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah seharusnya dapat meningkatkan sumber dana dan belanja modal. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang meningkat berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita penduduk, sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk semakin meningkat. Berdasarkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sugiardi dan Supadmi (2014) pertumbuhan ekonomi berhasil memoderasi hubungan antara DAU terhadap belanja modal. Oleh karena itu penulis ingin menguji pertumbuhan ekonomi dalam mempengaruhi hubungan antara DAU dan belanja modal dengan variabel sebagai berikut:

H₁₀: Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pengaruh positif DAU terhadap pengalokasian belanja modal.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Variabel Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Ukur
Variabel Independen: 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)	Menurut Ardhini (2011), Kemandirian yang dimaksud adalah kemampuan pendapatan daerah dalam membiayai pengeluaran pemerintah daerah.	PAD dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah.	Rasio
2. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah (EFEKD)	Menurut Ardhini (2011), Analisis efektivitas menggambarkan kemampuan pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target PAD yang ditetapkan.	Realisasi PAD dibandingkan dengan Target Penerimaan PAD.	Rasio
3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (EFIKD)	Menurut Ardhini (2011), Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah.	Realisasi Pengeluaran dibandingkan dengan Realisasi Penerimaan	Rasio
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan untuk anggaran belanja modal.	Pajak Daerah (HPD), Retribusi Daerah (RD), Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah (PLPD) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah (LPS)	Nominal
5. Dana Bagi Hasil (DBH)	Menurut UU No. 33 Tahun 2004 DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.	DBH pajak dan DBH bukan pajak (Sumber Daya Alam)	Nominal

6. Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana Pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN	Celah Fiskal dan Alokasi Dasar	Nominal
7. Dana Alokasi Khusus (DAK)	Menurut Ardhani (2011), Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.	DAK dan DAK Tambahan	Nominal
Variabel Dependen: Belanja Modal (BM)	Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.	Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigrasi, dan Jaringan serta Belanja Aset Tetap Lainnya	Nominal
Variabel Moderating: Pertumbuhan Ekonomi (PE)	Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat	PDRB Harga Berlaku	Rasio

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah provinsi dari tahun 2012. Metode pemilihan sampel pada penelitian ini ditentukan dengan metode *purposive sampling* yang bertujuan agar memperoleh sampel yang *representative* (mewakili) sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria penentuan dalam sampel ini adalah 1)Merupakan provinsi di Indonesia, 2)Memiliki laporan keuangan tahun 2012, dan 3)Memiliki kelengkapan data dan informasi keuangan mengenai-mengenai variabel-variabel yang diteliti.

3.3. Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Moderated Regression Analysis (MRA)* dengan menggunakan program *Statistical Product and Service Solution (SPSS)*. MRA atau uji interaksi merupakan aplikasi khusus regresi liner berganda dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi atau perkalian antara dua atau lebih variabel independen (Ghozali, 2011). Tahap analisis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu, uji asumsi klasik, perumusan model *Moderated Regression Analysis (MRA)*, koefisien determinasi, uji kesesuaian model (uji F), uji t, dan uji hipotesis.

Persamaan regresi untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$BM = \alpha + \beta_1 RKKD + \beta_2 EFEKD + \beta_3 EFIKD + \beta_4 PAD + \beta_5 DBH + \beta_6 DAU + \beta_7 DAK + \beta_8 PE + \beta_9 (PE*PAD) + \beta_{10} (PE*DAU) + e$$

Keterangan:

- BM = Belanja Modal
- RKKD = Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
- EFEKD = Rasio Efektivitas Keuangan Daerah
- EFIKD = Rasio Efisiensi Keuaangan Daerah
- PAD = Pendapatan Asli Daerah
- DBH = Dana Bagi Hasil
- DAU = Dana Alokasi Umum
- DAK = Dana Alokasi Khusus
- α = Konstanta
- β = Koefisien Regresi
- e = Tingkat Kesalahan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Semua variabel penelitian telah lolos uji asumsi klasik. Hasil uji normalitas, yaitu nilai Kolmogorov-Smirnov (K-S) dan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) seluruh variabel diatas $\alpha = 0,05$ yang berarti data yang diuji terdistribusi normal. Hasil uji multikolinearitas menyatakan nilai *tolerance* untuk seluruh variabel lebih besar dari 10% dan VIF lebih kecil dari 10 yang berarti bahwa data penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji heteroskedastisitas menyatakan nilai signifikansi untuk setiap variabel bebas terhadap nilai absolute residual lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.1
Uji Koefisien Determinasi

Model	R Square	Adjusted R Square
1	.828	.746

Tabel menunjukkan nilai *adjusted R²* sebesar 0,746 yang memiliki arti bahwa 74,6% perubahan belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel RKKD, EFEKD, EFIKD, PAD, DBH, DAU, DAK, PE, dan pemoderasi, sedangkan sisanya 25,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

2. Uji Statistik F

Tabel 4.2
Hasil Uji Statistik F
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.081	10	.008	10.112	.000 ^a
	Residual	.017	21	.001		
	Total	.098	31			

a. Predictors: (Constant), PEDAU, PAD, DAU, EFEKD, EFIKD, DAK, DBH, RKKD, PEPAD, PE

b. Dependent Variable: BM

Berdasarkan tabel dapat dilihat nilai F hitung sebesar 10,112 dengan probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis alternatif diterima. Hal ini berarti model regresi dapat digunakan untuk memprediksi belanja modal atau dapat dikatakan variabel RKKD, EFEKD, EFIKD, PAD, DBH, DAU, DAK, PE, dan pemoderasi berpengaruh terhadap variabel dependennya yaitu belanja modal.

3. Analisis Regresi

Tabel 4.3
Hasil Analisis Regresi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.873	2.005		1.932	.067
	RKKD	-.043	.021	-.496	-2.117	.046
	EFEKD	-.019	.050	-.046	-.380	.708
	EFIKD	.015	.053	.033	.289	.776
	PAD	1.640	.765	1.399	2.144	.044
	DBH	.253	.127	.434	1.989	.060
	DAU	-1.179	1.124	-.957	-1.049	.306
	DAK	.126	.256	.070	.491	.628
	PE	.751	.736	8.275	1.021	.319
	PEPAD	.186	.202	.876	.920	.368
	PEDAU	-.382	.416	-7.629	-.919	.369

4.2. Pembahasan

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian Belanja Modal

Hasil hipotesis pertama (H_1) diperoleh hasil nilai tingkat signifikansi pada Tabel 3 untuk variabel RKKD sebesar 0,046 lebih kecil dari 0,05 ($\alpha=5\%$) dan nilai koefisien regresi sebesar -2,2117. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hasil analisis tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian Hidayat (2013), Sularso dan Restianto (2011), serta Kusumawati (2011) yang menyatakan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap pengalokasian belanja modal. Akan tetapi, hasil analisis ini mendukung hasil penelitian Ardhini (2011) dan Fitri (2011) yang menyatakan rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap pengalokasian belanja modal.

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Suatu daerah yang dikatakan mandiri dapat meningkatkan jumlah belanja modal untuk pelayanan publik (Ardhani, 2011). Berdasarkan pada Tabel 3 di atas walaupun pemerintah daerah mandiri dalam hal keuangan dengan tidak bergantung kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah telah mandiri, tetapi pengalokasian belanja modal menurun hal ini dapat disebabkan PAD pemerintah daerah dialokasikan untuk belanja lain yang bukan termasuk belanja modal. Rasio kemandirian keuangan daerah merupakan variabel yang digunakan dalam beberapa penelitian pengalokasian belanja modal.

Dari beberapa hasil penelitian tentang pengalokasian belanja modal menyatakan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap pengalokasian belanja modal, Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan nilai yang signifikan tetapi dengan arah negatif. Jadi semakin mandiri suatu daerah maka pengalokasian belanja modal akan menurun. Dengan demikian hipotesis rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal ditolak.

2. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian Belanja Modal

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa rasio efektivitas keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal dengan nilai signifikansi 0,708 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($\alpha=5\%$). Hasil analisis tersebut tidak konsisten dengan hasil

penelitian Fitri (2011), Hidayat (2013), Sularso dan Restianto (2011), serta Ardhini (2011) yang menyatakan bahwa rasio efektifitas keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Ardhini, 2011). Dari beberapa hasil penelitian tentang pengalokasian belanja modal menyatakan bahwa rasio efektifitas keuangan daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal, tetapi hasil penelitian ini menunjukkan hal sebaliknya.

Apabila dilihat dari laporan realisasi APBD tahun 2012, tidak menunjukkan bahwa semakin efektif keuangan daerah akan mempengaruhi pengalokasian belanja modal. Dengan demikian hipotesis rasio efektifitas keuangan daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal ditolak.

3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa rasio efisiensi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal dengan nilai signifikansi 0,776 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($\alpha=5\%$). Hasil analisis tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian Ardhini (2011), Hidayat (2013), Sularso dan Restianto (2011), serta Kusumawati (2011) yang menyatakan bahwa rasio efisiensi keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap pengalokasian belanja modal. Akan tetapi, hasil analisis ini konsisten dengan hasil penelitian Fitri (2011) yang menyatakan rasio efisiensi keuangan daerah tidak memiliki pengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien (Ardhini, 2011). Dari beberapa hasil penelitian tentang pengalokasian belanja modal menyatakan bahwa rasio efisien keuangan daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal, tetapi hasil penelitian ini menunjukkan hal sebaliknya.

Alasan efisiensi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal karena keuangan daerah pemerintah provinsi tidak efisien masih terjadi tumpang tindih pendanaan dan tidak sesuai dengan implementasi anggarannya (Fitri, 2011). Dengan demikian hipotesis rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal ditolak.

4. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal dengan nilai signifikansi 0,044 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 ($\alpha=5\%$). Hasil analisis tersebut konsisten dengan hasil penelitian Sugiardi dan Supadmi (2014), Ardhini (2011), Sulistyowati (2011) dan Fitri (2013) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap pengalokasian belanja modal. Akan tetapi, hasil analisis ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Yovita (2011) yang menyatakan pendapatan asli daerah tidak memiliki pengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.

Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004, PAD merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, agar pemerintah daerah tidak cenderung berlomba-lomba mengeksploitasi PAD dengan membuat syarat pungutan baru yang dapat membebani masyarakat.

Dari Tabel 3 yang telah dilakukan membuktikan bahwa semakin tinggi PAD yang diperoleh pemerintah provinsi akan mengurangi ketergantungan dana dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi mampu memenuhi kebutuhan belanja modalnya. Dengan demikian hipotesis PAD berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal diterima.

5. Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal dengan nilai signifikansi 0,060 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($\alpha=5\%$). Hasil analisis tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian Romario (2012), Wandira (2013), dan Siregar (2013) yang menyatakan bahwa dana bagi hasil memiliki pengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.

DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Secara teoritis pemerintah daerah akan mampu menetapkan belanja modal semakin besar jika anggaran DBH semakin besar pula.

Berdasarkan hasil yang diperoleh maka analisis ini tidak mendukung teori yang menyatakan bahwa pemerintah daerah akan mampu menetapkan belanja modal yang semakin

besar jika anggaran DBH semakin besar pula. Dengan demikian DBH tidak dapat dijadikan indikator dalam menentukan pengalokasian belanja modal. Jadi, hasil penelitian ini menolak hipotesis bahwa DBH berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal.

6. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal dengan nilai signifikansi 0,306 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($\alpha=5\%$). Hasil analisis tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian Sugiardi dan Supadmi (2014), Ardhini (2011), dan Solikin (2009) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum memiliki pengaruh terhadap pengalokasian belanja modal. Akan tetapi, hasil analisis ini konsisten dengan hasil penelitian Fitri (2012) dan Kusnandar dan Siswantoro (2012) yang menyatakan dana alokasi umum tidak memiliki pengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.

DAU merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Menurut Pradita (2012), DAU berpengaruh terhadap belanja modal hal ini disebabkan karena dengan adanya transfer DAU dari pemerintah pusat maka pemerintah daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai belanja modal.

Berdasarkan Tabel 3 yang telah dilakukan tidak membuktikan bahwa semakin tinggi DAU maka pengalokasi belanja modal akan semakin besar. Alasan DAU tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal karena DAU merupakan dana transfer yang bersifat *block grant* yang penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai prioritas daerah dan jumlah yang dialokasikan pun tidak terlalu besar sehingga tidak dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Dengan demikian DAU tidak dapat dijadikan indikator dalam menentukan pengalokasian belanja modal. Jadi, hasil analisis ini menolak hipotesis bahwa DAU berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal.

7. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal dengan nilai signifikansi 0,319 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($\alpha=5\%$). Hasil analisis tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian Situngkir (2009), Ardhini (2011), dan Wandira (2012) yang menyatakan bahwa dana alokasi khusus memiliki pengaruh terhadap pengalokasian belanja modal. Akan tetapi, hasil analisis ini konsisten dengan hasil

penelitian Darmayasa dan Suandi (2014) dan Sulistyowati (2012) yang menyatakan dana alokasi khusus tidak memiliki pengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.

DAK merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 33 Tahun 2004). Menurut Ardhani (2011), Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang.

Akan tetapi, berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan DAK tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal. DAK bersifat *special grant* yang berarti penggunaannya ditentukan pemerintah pusat untuk mendanai pembangunan yang merupakan bagian dari belanja modal dan persentase DAK untuk belanja modal yang kecil menjadi penyebab tidak signifikannya pengaruh DAK terhadap pengalokasian belanja modal. Dengan demikian DAK tidak dapat dijadikan indikator dalam menentukan pengalokasian belanja modal. Jadi, hasil analisis ini menolak hipotesis bahwa DAK berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal.

8. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal dengan nilai signifikansi 0,695 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($\alpha=5\%$). Hasil analisis tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian Sularno (2013), Taiwo dan Abayomi (2011) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap pengalokasian belanja modal. Akan tetapi, hasil analisis ini konsisten dengan hasil penelitian Ardhani (2011), Maharani (2010), dan Putro (2010) yang menyatakan pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.

Menurut Hasan (2012), pertumbuhan ekonomi merupakan parameter dari suatu kegiatan pembangunan, hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi dapat mengukur tingkat perkembangan aktivitas pada sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan dari kegiatan perekonomian dimana hal tersebut berdampak pada jumlah produksi barang dan jasa yang semakin bertambah sehingga kemakmuran masyarakat meningkat (Putro, 2010).

Akan tetapi berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan maka menolak pendapat Putro (2010) sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal hal ini sesuai dengan hasil penelitian Fitri (2011) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh pada belanja

modal. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal ditolak.

9. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan pengalokasian belanja modal

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh dan tidak dapat memoderasi hubungan PAD terhadap alokasi belanja modal dengan nilai signifikansi 0,368 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($\alpha=5\%$). Hasil analisis tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian Sugiardi dan Supadmi (2014) dan Jaya dan Dwirandra (2014) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi hubungan antara PAD dengan pengalokasian belanja modal. Hasil analisis ini juga menolak hipotesis pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap hubungan PAD dengan pengalokasian belanja modal.

Menurut Jaya dan Dwirandra (2014), semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka pengaruh pendapatan asli daerah pada belanja modal semakin menurun. Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Ketika suatu daerah telah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah daerah akan mengurangi pengalokasian belanja modalnya dan menggunakan pendapatan asli daerahnya untuk belanja-belanja selain belanja modal seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Hal ini karena tujuan pemerintah daerah melakukan belanja modal yaitu untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi sudah tercapai.

Akan tetapi berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan maka penelitian ini ini menolak pendapat Jaya dan Dwirandra (2014) bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap pengalokasian belanja modal. Hasil uji hipotesis yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki kontribusi positif terhadap pengalokasian belanja modal berdampak pada hubungan PAD terhadap pengalokasian belanja modal. Pertumbuhan ekonomi yang tidak memiliki kontribusi terhadap pengalokasian belanja modal tidak dapat mempengaruhi hubungan PAD dan belanja modal. Walaupun pertumbuhan ekonomi daerah baik namun hal ini tidak dapat menjadi salah satu indikator pengalokasian PAD untuk belanja modal.

10. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap hubungan Dana Alokasi Umum dengan pengalokasian belanja modal

Hasil penelitian ini membuktikan pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi hubungan antara DAU dengan pengalokasian belanja modal dengan nilai signifikansi 0,061

dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($\alpha=5\%$). Hasil analisis tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian Sugiardi dan Supadmi (2014), yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi hubungan antara DAU dengan pengalokasian belanja modal. Hasil analisis ini juga menolak hipotesis pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap hubungan DAU dengan pengalokasian belanja modal.

Menurut Sugiardi dan Supadmi (2014), besarnya pertumbuhan ekonomi yang terdapat pada masing-masing daerah dapat memperlemah hubungan antara DAU dan belanja modal. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka pengaruh DAU pada belanja modal semakin menurun. Akan tetapi penelitian ini menolak pendapat tersebut karena berdasarkan hasil uji hipotesis pertumbuhan ekonomi tidak dapat mempengaruhi hubungan DAU pada belanja modal.

Berdasarkan hasil uji hipotesis bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki kontribusi positif terhadap pengalokasian belanja modal maka berdampak pada hubungan DAU terhadap pengalokasian belanja modal. Pertumbuhan ekonomi yang tidak memiliki kontribusi terhadap pengalokasian belanja modal tidak dapat mempengaruhi hubungan DAU dan belanja modal. Walaupun pertumbuhan ekonomi daerah baik namun hal ini tidak dapat menjadi salah satu indikator pengalokasian DAU untuk belanja modal. Hal ini disebabkan karena DAU bersifat *block grant* yang penggunaannya diserahkan kepada pemerintah daerah maka dana tersebut lebih diutamakan untuk belanja lain yang bukan termasuk belanja modal.

5. SIMPULAN DAN SARAN PENELITIAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji determinan atau faktor penentu pengalokasian belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderating dalam APBD pemerintah provinsi di Indonesia pada tahun 2012. Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap pengalokasian belanja modal. Hasil uji hipotesis rasio efektivitas keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, DAU, DAK, dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pengalokasian belanja modal. Namun, hasil uji hipotesis PAD dan DBH memiliki hubungan signifikan positif terhadap pengalokasian belanja modal. Adapun hasil uji hipotesis dengan variabel moderating pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa PAD dan DAU tidak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pengalokasian belanja modal.

Pemerintah provinsi di Indonesia diharapkan supaya lebih mandiri dan tidak bergantung kepada pemerintah pusat. Dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dan tidak bergantung kepada dana dari pemerintah pusat. Hal ini berdasarkan hasil penelitian ini bahwa dana pertimbangan yang terdiri dari DBH, DAU, dan DAK yang tidak memiliki pengaruh terhadap pengalokasian belanja modal. Pemerintah provinsi juga harus memperhatikan alokasi anggaran dari dana PAD, diupayakan untuk dialokasikan lebih banyak kepada Belanja Modal yang memberikan implikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini berdasarkan kesimpulan sebelumnya bahwa PAD memiliki pengaruh terhadap pengalokasian belanja modal, pemerintah dapat memaksimalkan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah sehingga pengalokasian belanja modal akan sesuai dengan yang telah ditargetkan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil simpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi penelitian berikutnya berdasarkan keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian adalah nilai *Adjusted R²* dari model yang di uji dalam penelitian ini sebesar 74,6% maka ada 25,4% variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi alokasi belanja modal, sehingga selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan untuk menggunakan variabel lainnya seperti SiLPA dan belanja pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy & Halim, Abdul. 2004. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah*. Simposium Nasional Akuntansi VI.
- Ardhani, Pungky. 2011. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah)*. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ardhini. 2011. *Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Prespektif Teori Keagenan (studi pada kabupaten dan kota di Jawa Tengah)*. Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Badan Pusat Statistik. 2014. *Berita Resmi Statistik No. 63/08/Th. XVII*. Jakarta
- Bataineh, Ibrahim Mohamed Al. 2012. *The Impact of Government Expenditures on Economic Growth in Jordan. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business*.
- Darmayasa, I Nyoman dan Suandi, I Ketut. 2014. *Faktor Penentu Alokasi Belanja Modal Dalam APBD Pemerintah Provinsi*. SNA XVII Mataram 24-27 September 2014.
- Darwanto dan Yulia Yustika Sari. 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. Simposium Nasional Akuntansi X Makassar 26-28 Juli 2007.
- Fitri, Vella Kurniasih. 2013. *Pengaruh rasio keuangan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di provinsi riau Tahun 2009-2012*. Universitas Riau. Riau

- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Halim, Abdul, 2002. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Pertama*. Salemba Empat, Jakarta.
- _____. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2008. *Analisis Investasi (Belanja Modal) Sektor Publik-Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- _____, 2009. *Analisis Investasi, Edisi Pertama*. Salemba Empat, Jakarta.
- Halim Abdul & Syukriy Abdullah. 2006. *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah; Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi*, Jurnal Akuntansi Pemerintah, 2 (1) :53-64
- Halim, Abdul dan Kusufi, Muhamad Syam.(2012). *Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan aplikasi*. Jakarta:Salemba Empat.
- Hasan, T.I.B. 2012. *Pengaruh Belanja Modal Pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Penduduk Miskin di Aceh*. Journal SAINS Riset, 1(1).
- Hidayat, Mochamad Fajar. 2013. *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur)*. Universitas Brawijaya. Malang
- Jaya, I Putu Ngurah Panji Kartika dan Dwirandra, A.A.N.B. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Permoderasi*. Universitas Udayana. Bali
- Jiwatami, Sandhyakalaning. 2013. *Pengaruh Kemandirian Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah (Pada Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2008-2012)*. Simposium Nasional Akuntansi XVI, Manado, 25-28 September 2013.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002. *Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengurusan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Jakarta
- Kusnandar, dan Siswanto, Dodik. 2012. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal*. SNA XV Banjarmasin 20-23 September 2012.
- Kusumawati, Vegasari Endah. 2010. *Faktor-Faktor Yang Menentukan Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Di Indonesia*. Universitas Muhamadiyah Yogyakarta. Yogyakarta
- Lukha, Dinda Anggita. 2013. *Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara*. Universitas Negeri Medan. Medan
- Maggi, Eva Maria dan Ladurner, Ulrich. 2009. *Federal Features and Financial Decentralization.Inhouse Seminar. Eurac Research*.
- Maharani, Mayzestika. 2010. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga. Jakarta
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Maryadi. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2012*. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjung Pinang
- Ogujiuba, Kanayo and Abraham, Terfa W. 2012. *Testing the Relationship between Government Revenue and Expenditure: Evidence from Nigeria*.International Journal of Economics and Finance, Vol. 4, No. 11, pp: 172-182.
- Paujjiah, Sri Puji. 2012. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal*. Universitas Siliwangi.
- Putro, Nugroho S. 2010. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. *Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta
- Pradita, Rizanda Ratna. 2012. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Jawa Timur*. Universitas Negeri Surabaya. Surabaya
- Romario, R.F. 2012. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Universitas Sumatera Utara. Medan
- Salih, Mohame Abdel Rahman. 2012. *The Relationship between Economic Growth and Government Expenditure: Evidence from Sudan*. *International Business Research*; Vol. 5, No. 8; 2012
- Santosa, Budi. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Daerah terhadap Pertumbuhan, Pengangguran dan kemiskinan 33 provinsi di Indonesia*. *Jurnal Keuangan dan Bisnis* Vol 5, No. 2. Jakarta
- Siregar, Anggi Rezeki. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer Terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Aceh*. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Situngkir, Anggiat. 2009. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Sumatera Utara*. Universitas Sumatera Utara. Medan
- Sugiarthi, Ni Putu Dwi Eka Rini dan Supatmi, Ni Luh. 2014. *Pengaruh PAD, DAU, Dan SILPA Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi*. Universitas Udayana. Bali
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sularso, Havid, dkk. 2011. *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi*. Universitas Jenderal Soedirman. *Jurnal Media Riset Akuntansi*, vol.1No. 2 Agustus 2011 hal 109-123. Purwokerto
- Sularno, F.M. 2013. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Universitas Widyatama. Bandung.
- Solikin, Ikin, 2010. *Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Jawa Barat*.
- Sulistyowati, Diah. 2011. *Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja modal*. Universitas Diponegoro. Semarang
- Taiwo, Muritala dan Taiwo Abayomi. 2011. *Government Expenditure and Economic Development*. *European Journal of Business and Management*, 3(9).
- Uhise, Stephani. 2013. *Dana Alokasi Umum (DAU) Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. *Pemerintah Daerah*. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. *Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta
- Wandira, Arbie Gugus. 2013. *Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. Universitas Negeri Semarang. Semarang
- Widhiarso, Wahyu. 2010. *Prosedur Analisis Regresi dengan Variabel Moderator Tunggal melalui SPSS*. Universitas Gadjah Mada.
- Yovita, Farah Marta. 2011. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008 – 2010)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.